



P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236



Analisis Masalah dan Tantangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan Tambang Batubara untuk Pembangunan Berkelanjutan

Denny Firmansyah¹⁾, Aris Susilo²⁾, Yuniar Pratiwi³⁾

Universitas Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia

dfirmanzh@gmail.com¹⁾
s2tparissusilo@gmail.com²⁾
ynr.pratiwi@yahoo.com³⁾

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui masalah dan tantangan dalam implementasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk komitmen perusahaan yang harus dijalankan perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif, dengan melakukan observasi, pengumpulan data dan dokumen dari institusi perusahaan tambang di Kabupaten Lahat dan indeep interview dengan cara purposive sampling terhadap narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil kuesioner di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum menilai program PPM PT X bermanfaat, terutama dalam peningkatan pendapatan, dukungan fasilitas umum, serta penguatan sosial-budaya. Namun, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan utama, yaitu: Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan program, sehingga keberlanjutan masih bergantung pada perusahaan, Keterbatasan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menghambat sinergi antar pihak, Manfaat program belum merata, sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh dampak signifikan, Pendampingan berkelanjutan masih lemah, terutama pada program ekonomi produktif, Aspek lingkungan belum optimal, sehingga keberlanjutan ekologi masih menjadi catatan kritis. Dengan demikian, meskipun program PPM X telah memberikan kontribusi nyata, diperlukan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta model pemberdayaan yang lebih partisipatif dan terukur, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Lingkungan Tambang, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Masyarakat, Perusahaan Batubara, Keberlanjutan

Abstract

The purpose of this study is to identify the problems and challenges in implementing the Community Development and Empowerment program as a form of corporate commitment that must be carried out by the company. The method used is a qualitative descriptive method, by conducting observations, collecting data and documents from mining companies in Lahat Regency, and conducting in-depth interviews using purposive sampling of sources relevant to the research objectives. Based on the results of questionnaires in Prabumenang Village and Banjarsari Village, it can be concluded that the community generally considers PT X's PPM program to be beneficial, especially in terms of increasing income, supporting public facilities, and strengthening socio-cultural aspects. However, there are still several major problems and challenges, namely: Lack of active community participation in program planning and management, so that sustainability still depends on the company; Limitations in coordination with local governments, which hinder synergy between parties; Program benefits are not evenly distributed, so that some communities feel they have not received a significant impact. Sustainable assistance is still weak, especially in productive economic

programs. Environmental aspects are not yet optimal, so ecological sustainability remains a critical issue. Thus, although the PPM X program has made a real contribution, it is necessary to improve quality, sustainability, and a more participatory and measurable empowerment model in order to be in line with sustainable development goals.

Key words: *Mining Environment, Community Empowerment, Community Development, Coal Companies, Sustainability*

PENDAHULUAN

PT. X merupakan salah satu perusahaan dalam negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan di bidang pertambangan batubara. Sebagai perusahaan swasta nasional, PT. X memiliki visi menjadi perusahaan tambang batubara profesional yang peduli terhadap lingkungan dengan pertumbuhan berkesinambungan, serta memiliki misi mengimplementasikan pertambangan yang baik dan tata kelola yang baik disetiap aktivitas untuk memberikan nilai yang lebih besar bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Namun dalam implementasinya masih belum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM No 1824K/30/MEM/2018. Prinsip dasar ilmu lingkungan diantaranya adalah fungsi sosial (Gumanti et al., 2016; Juniah & Sastradinata, 2017; Susilo et al., 2022). Dimana Perusahaan harus peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktifitas yang dijalankan. Salah satu elemen yang harus diwujudkan Perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial pemberdayaan masyarakat (Fusheini & Salia, 2021; Gugule & Mesra, 2022; Sadiq et al., 2022; Sarhan & Al-Najjar, 2023; Umar, 2022).

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat sejalan dengan konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) dimana bahan galian termasuk Batubara dalam pemanfaatannya harus optimal karena harus mampu melindungi fungsi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan pertambangan pada akhirnya akan mempengaruhi sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat (Drempetic et al., 2020; Nguyen & Nguyen, 2023).

Oleh karena itu, fokus program pemberdayaan masyarakat harus mengacu pada program yang berkelanjutan. Peran elemen masyarakat dan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan perusahaan (Huynh, 2020; Ji & Miao, 2020; Velte, 2020). Tanpa peran kedua elemen tersebut, program pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan sesuai target yang ditentukan. Perusahaan sering kali mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan jangka pendek dan dalam lingkup yang sempit (Burkhardt et al., 2020; Drempetic et al., 2020; Menassa & Dagher, 2020; Zamir & Saeed, 2020).

Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sering kali tidak menjadi solusi atas persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan dianggap sebagai sarana bagi perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan bukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Abu Zayyad et al., 2021; Bansal & Kumar, 2021; Bux et al., 2020; Carlini & Grace, 2021; Khuong et al., 2021; Li & Wang, 2022; Zheng et al., 2022). Program seyogyanya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari shareholders, akademisi, masyarakat dan pemerintah (Abbas, 2020; Aljarah et al., 2020; Anwar & Malik, 2020; Blanco-Gonzalez et al., 2020; Hasan et al., 2022; Hassan et al., 2020; Hemerijck, 2020; Kamalirezaei et al., 2020).

Mengacu pada Bab V pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ; dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Diperkuat oleh Kepmen ESDM No 1824 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, PT. X mulai mengimplementasikan tahun 2021 hingga saat ini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat PT. X dilakukan setiap tahun dengan program yang dibagi dalam delapan program dasar antara lain ; pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan real dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, pembentukan kelembagaan masyarakat untuk menunjang program yang dijalankan, serta pembangunan infrastruktur.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas implementasi CSR dan PPM di sektor pertambangan. Gumanti et al. (2016) menekankan bahwa program CSR pertambangan di Indonesia cenderung masih berorientasi pada kegiatan filantropi dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian masyarakat. Susilo et al. (2022) menemukan bahwa pelaksanaan CSR perusahaan tambang di Kabupaten Lahat telah memberikan manfaat sosial dan ekonomi, namun masih lemah pada aspek keberlanjutan dan evaluasi dampak jangka panjang. Sementara itu, Gugule dan Mesra (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program PPM sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan lokal, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada satu sektor komoditas pertanian dan belum mengkaji tantangan struktural dalam koordinasi multipihak.

Meskipun kajian mengenai CSR dan PPM di sektor pertambangan relatif banyak, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pengukuran dampak atau tingkat keberhasilan program secara umum. Masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji masalah dan tantangan implementasi PPM berdasarkan pedoman Kepmen ESDM No. 1824K/30/MEM/2018, terutama dari perspektif partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program di tingkat lokal. Selain itu, permasalahan partisipasi masyarakat pada PT X memiliki karakteristik yang relatif unik dibandingkan kasus tambang lain, karena program PPM telah mencakup delapan bidang utama dan dilaksanakan secara rutin, namun keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pengelolaan, dan pascaprogram masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa luasnya cakupan program tidak serta-merta menjamin keberhasilan pemberdayaan apabila tidak diiringi dengan model partisipasi yang kuat dan sinergi antarpemangku kepentingan.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap masalah dan tantangan implementasi Program PPM PT X, tidak hanya dari sisi manfaat yang dirasakan masyarakat, tetapi juga dari aspek tata kelola, partisipasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pendekatan evaluatif-kritis yang mengaitkan praktik PPM di tingkat perusahaan dengan kerangka regulasi nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan tambang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan model PPM yang lebih partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui masalah dan tantangan dalam implementasi program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk komitmen perusahaan sesuai Kepmen ESDM 1824K/30/MEM/2018 yang harus dijalankan perusahaan. Karena bila program ini dapat berjalan optimal, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang batu bara serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode campuran (*mixed methods*). Data kualitatif diperoleh melalui observasi lapangan, telaah dokumen perusahaan tambang di Kabupaten Lahat, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik purposive sampling. Kriteria narasumber yang dipilih meliputi: (1) masyarakat yang secara langsung menjadi penerima manfaat Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), (2) perangkat desa yang mengetahui perencanaan dan pelaksanaan program PPM, serta (3) perwakilan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program PPM. Pemilihan kriteria tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarikan kepada masyarakat penerima manfaat program PPM di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari dengan menggunakan skala Likert. Data kuesioner digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi temuan kualitatif, khususnya dalam menggambarkan persepsi masyarakat terhadap manfaat,

tantangan, dan keberlanjutan program PPM. Dengan demikian, pendekatan mixed methods dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, di mana data kualitatif digunakan untuk memahami konteks dan permasalahan secara mendalam, sedangkan data kuantitatif berperan sebagai pendukung dalam mengidentifikasi kecenderungan umum persepsi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Program PPM PT. X

Hasil pelaksanaan penelitian ini merupakan tindak lanjut dari rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam proposal penelitian, dengan fokus pada analisis masalah dan tantangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan oleh PT X dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer berupa kuesioner dan wawancara terhadap penerima manfaat program, serta telaah dokumen perusahaan terkait implementasi PPM tahun 2024.

Secara umum, data yang diperoleh menggambarkan bahwa perusahaan telah melaksanakan delapan bidang program PPM yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, keagamaan-sosial-budaya, partisipasi lingkungan, pembentukan kelembagaan masyarakat, dan infrastruktur. Berikut 8 bidang Program PPM yang telah dijalankan oleh PT X :

1. Bidang Pendidikan

Program pendidikan yang dilaksanakan PT X berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya di wilayah ring 1 dan ring 2 perusahaan. Realisasi anggaran mencapai Rp215 juta, yang dialokasikan ke lima kegiatan utama. Pertama, pemberian beasiswa dan bantuan prestasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini sangat strategis karena mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan pendidikan formal yang lebih baik, generasi muda memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan bersaing di dunia kerja. Kedua, perusahaan memberikan bantuan sembako bagi guru honorer yang bertugas di PAUD, TK, SD, hingga Madrasah. Langkah ini bukan hanya bentuk apresiasi terhadap dedikasi tenaga pendidik, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan mereka yang umumnya masih minim perhatian. Ketiga, pelaksanaan pelatihan dan kursus komputer untuk pemuda dan guru. Program ini relevan dengan kebutuhan era digital, sekaligus memperluas keterampilan dasar teknologi informasi yang dibutuhkan baik dalam dunia kerja maupun pembelajaran.

Selanjutnya, dukungan terhadap sarana dan prasarana sekolah (baik negeri, swasta, maupun pondok pesantren) menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada individu, melainkan juga mendukung sistem pendidikan secara kelembagaan. Bantuan ini mencakup perbaikan fasilitas belajar sehingga tercipta lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif. Kelima, penyediaan buku-buku perpustakaan merupakan langkah sederhana tetapi penting untuk meningkatkan literasi di sekolah. Buku tetap menjadi sumber pengetahuan utama bagi siswa, terutama di wilayah yang akses internetnya terbatas.

Secara keseluruhan, program pendidikan PPM PT X memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM lokal. Meskipun program pendidikan PT X telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses dan fasilitas pendidikan, tantangan mendasar terletak pada belum terintegrasinya program dengan perencanaan pendidikan daerah. Program masih berfokus pada bantuan langsung (beasiswa, sarana, dan insentif), sementara aspek keberlanjutan seperti pemetaan kebutuhan SDM jangka panjang dan pelacakan capaian lulusan belum menjadi indikator utama. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan seharusnya berperan sebagai instrumen transformasi sosial, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan sesaat. Tanpa sistem evaluasi dampak jangka panjang, efektivitas program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal masih sulit

diukur secara komprehensif.

2. Bidang Kesehatan

Program kesehatan yang diimplementasikan PT X menekankan pada peningkatan akses layanan dasar, pencegahan penyakit, serta dukungan fasilitas kesehatan masyarakat sekitar tambang. Dengan alokasi dana Rp210 juta, kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai aspek promotif, preventif, dan kuratif. Pertama, bantuan kegiatan Posyandu dan pemberian makanan bergizi bagi balita, lansia, serta anak yang berisiko stunting. Program ini berperan penting dalam mencegah masalah gizi kronis yang dapat berdampak pada kualitas generasi mendatang. Kedua, perusahaan menyediakan bantuan sembako bagi tenaga kesehatan sukarela di UPT Puskesmas. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi mereka, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras tenaga kesehatan garda terdepan di desa-desa ring 1. Ketiga, peningkatan sarana prasarana puskesmas melalui dukungan fasilitas dasar. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sering menghadapi keterbatasan alat medis dan ruang layanan kesehatan.

Selanjutnya, penyuluhan kesehatan masyarakat gratis turut diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat, pencegahan penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Upaya edukasi ini memiliki dampak jangka panjang karena mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Terakhir, pengobatan gratis dalam bentuk pemeriksaan kesehatan, operasi katarak, sunatan massal, hingga operasi bibir sumbing memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang sulit menjangkau layanan kesehatan modern akibat faktor biaya maupun lokasi.

Secara umum, bidang kesehatan PPM PT X berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program kesehatan menunjukkan orientasi kuat pada layanan dasar dan bantuan langsung, namun risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan perusahaan masih cukup tinggi. Minimnya penguatan kapasitas kader kesehatan lokal dan lemahnya integrasi dengan sistem kesehatan pemerintah berpotensi menjadikan program bersifat karitatif. Dalam perspektif keberlanjutan sosial, program kesehatan idealnya diarahkan pada peningkatan literasi kesehatan dan kemandirian masyarakat. Tanpa penguatan aktor lokal dan sistem monitoring kesehatan jangka panjang, dampak program berisiko berhenti pada output layanan, bukan pada penguatan sistem kesehatan masyarakat sekitar tambang.

3. Bidang Tingkat Pendapatan Riil atas Pekerjaan

Bidang ini difokuskan pada peningkatan keterampilan kerja, pengembangan wirausaha, serta diversifikasi mata pencaharian masyarakat agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Dengan anggaran Rp115 juta, terdapat empat kegiatan inti. Pertama, pelatihan kewirausahaan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pelatihan ini sangat relevan karena mayoritas masyarakat sekitar tambang masih memiliki lahan pertanian dan berpotensi mengembangkan sektor pangan sebagai penopang ekonomi keluarga. Kedua, pelatihan dasar bekerja di tambang mencakup operator, elektronik, dan mekanik. Program ini memberi peluang kepada pemuda lokal untuk mendapatkan keterampilan teknis yang sesuai kebutuhan perusahaan, sehingga mereka bisa terserap dalam lapangan kerja formal. Hal ini juga sejalan dengan konsep local content yang mendorong keterlibatan tenaga kerja dari daerah sekitar. Ketiga, budidaya jamur tiram beserta turunannya dilaksanakan melalui pelatihan sekaligus bantuan sarana, termasuk aspek manajemen, pemasaran, hingga pengolahan produk. Diversifikasi ekonomi ini penting karena memberikan alternatif sumber pendapatan rumah tangga yang relatif cepat menghasilkan. Keempat, budidaya ternak kambing juga diperkuat dengan bantuan pakan, vitamin, dan pelatihan perawatan hewan. Usaha peternakan menjadi salah satu sektor berkelanjutan yang dapat berkembang dengan baik di desa, sekaligus menjadi sumber protein hewani masyarakat.

Secara keseluruhan, bidang ini merupakan upaya nyata perusahaan dalam menciptakan masyarakat produktif dan mandiri. Tantangannya adalah pendampingan pascapelatihan. Banyak

program pemberdayaan ekonomi gagal berkelanjutan karena kurangnya monitoring dan keterhubungan dengan pasar. Oleh karena itu, keberhasilan program peningkatan pendapatan riil akan optimal apabila perusahaan menjalin kemitraan dengan dinas terkait atau lembaga koperasi untuk memperkuat akses pasar, permodalan, serta distribusi produk lokal.

Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan kerja dan usaha produktif menghadapi tantangan serius pada fase pascapelatihan. Keterbatasan akses pasar, modal, dan pendampingan berkelanjutan menyebabkan potensi kegagalan usaha dalam jangka menengah. Selain itu, orientasi pelatihan kerja tambang berisiko memperkuat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor ekstraktif. Dalam konteks keberlanjutan, program ini perlu diarahkan pada penciptaan mata pencaharian alternatif yang tetap bertahan ketika aktivitas pertambangan berkurang atau berhenti.

4. Bidang Kemandirian Ekonomi

Bidang kemandirian ekonomi berfokus pada penguatan UMKM, pemberdayaan perempuan, serta dukungan ekonomi rumah tangga agar masyarakat mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan pada perusahaan. Dengan total anggaran Rp165 juta, terdapat enam kegiatan inti. Pertama, pelatihan dan pembentukan UMKM baru. Langkah ini penting sebagai dasar pembinaan wirausaha lokal agar mampu menciptakan nilai tambah dari potensi desa. Kedua, pelatihan dan bantuan sarana untuk UMKM yang sudah berjalan. Bantuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada penciptaan usaha baru, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha lama yang sudah memberi manfaat ekonomi. Ketiga, pelatihan keterampilan PKK meliputi tata boga, jahit-menjahit, dan tata rias. Kegiatan ini memberdayakan kaum perempuan sehingga dapat meningkatkan penghasilan keluarga melalui keterampilan rumah tangga yang bernilai jual.

Selanjutnya, bantuan sarana prasarana pertanian dan perikanan berupa bibit, pupuk, hingga pakan ikan. Dukungan ini sangat relevan untuk meningkatkan produktivitas petani dan nelayan desa. Kelima, pelatihan pemasaran produk UMKM berbasis digital marketing. Strategi ini menjawab tantangan era digital, di mana promosi melalui media sosial dan platform daring menjadi kunci dalam memperluas pasar.

Selain itu, bantuan sembako bagi keluarga miskin menjadi program perlindungan sosial jangka pendek agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Secara keseluruhan, bidang ini menekankan keseimbangan antara pemberdayaan dan perlindungan sosial. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa UMKM yang dibentuk benar-benar mampu bersaing di pasar dan tidak berhenti setelah bantuan awal berakhir. Perusahaan perlu mengembangkan model inkubasi bisnis lokal dan memperkuat jaringan pemasaran, sehingga UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar tambang secara berkelanjutan.

Bidang kemandirian ekonomi menunjukkan upaya transisi dari bantuan menuju pemberdayaan, namun daya saing UMKM binaan masih menjadi persoalan utama. Banyak UMKM belum memiliki keunikan produk, standar kualitas, dan jaringan pemasaran yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan program masih dominan berbasis proyek jangka pendek. Tanpa model inkubasi bisnis dan penguatan ekosistem usaha lokal, kemandirian ekonomi masyarakat berisiko tidak berkelanjutan dan kembali bergantung pada bantuan perusahaan.

5. Bidang Keagamaan, Sosial, dan Budaya Program keagamaan, sosial, dan budaya

yang dijalankan PT X memiliki ruang lingkup cukup luas, dengan total alokasi Rp250 juta. Program ini tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga memperkuat nilai sosial, budaya, dan solidaritas masyarakat. Pertama, bantuan kesejahteraan guru mengaji, marbot, dan petugas kebersihan merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap tokoh agama dan masyarakat yang seringkali luput dari perhatian, meski perannya penting dalam menjaga nilai moral serta kebersihan lingkungan ibadah. Kedua, dukungan hewan qurban dan kegiatan keagamaan lain menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung perayaan hari besar Islam, yang menjadi momentum penting kebersamaan masyarakat. Ketiga, bantuan sosial dan kebencanaan sangat

relevan, mengingat daerah sekitar tambang rentan terhadap bencana alam. Kehadiran perusahaan dalam memberikan bantuan darurat menunjukkan kepedulian sosial dan memperkuat citra positif perusahaan di mata warga. Selain itu, perusahaan juga mendukung kegiatan seni dan budaya melalui bantuan peralatan marawis, qasidah, drumband, hingga pelatihan menenun, songket, dan kerajinan dari bahan daur ulang. Dukungan ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memberi peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Di sisi lain, bantuan sarana mengaji seperti Iqra, meja Al-Qur'an, dan perlengkapan TPA mendukung penguatan pendidikan agama sejak dini. Tidak kalah penting, perusahaan berkontribusi dalam berbagai kegiatan perayaan hari besar seperti Ramadan, HUT RI, hingga kegiatan olahraga dan seni. Dukungan ini memperkuat kebersamaan serta kohesi sosial masyarakat desa.

Namun, tantangan bidang ini adalah bagaimana menjaga agar bantuan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat. Misalnya, pelatihan kerajinan budaya dapat diarahkan menjadi usaha ekonomi kreatif, sementara kegiatan sosial bisa dikaitkan dengan pembentukan komunitas yang lebih mandiri. Dengan demikian, bidang ini tidak hanya berperan sebagai simbol kepedulian, tetapi juga memberi dampak jangka panjang terhadap pembinaan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Program sosial-keagamaan berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan legitimasi perusahaan, namun masih didominasi oleh pendekatan filantropi dan seremonial. Kontribusi terhadap pembentukan kapasitas sosial jangka panjang relatif terbatas. Padahal, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, kegiatan sosial dan budaya dapat diarahkan sebagai basis penguatan ekonomi kreatif dan kohesi sosial yang mandiri. Tanpa transformasi pendekatan ini, program berisiko hanya memperkuat citra perusahaan tanpa memberikan dampak struktural yang berkelanjutan.

6. Bidang Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Program lingkungan hidup yang dilaksanakan PT X berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sekaligus mengurangi dampak negatif aktivitas pertambangan. Dengan anggaran Rp80 juta, terdapat empat kegiatan utama. Pertama, pelatihan dan bantuan sarana bank sampah dan TPS. Program ini tidak hanya berorientasi pada kebersihan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, karena sampah dapat dipilah dan dikelola menjadi produk bernilai ekonomi. Kedua, bantuan bibit buah-buahan mendukung penghijauan sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Tanaman buah bukan hanya berfungsi sebagai peneduh, tetapi juga sumber pangan tambahan yang dapat dipasarkan. Ketiga, penanggulangan dampak debu dengan penyiraman jalan umum. Hal ini merupakan langkah teknis penting karena aktivitas tambang biasanya menimbulkan debu yang mengganggu kesehatan dan mobilitas masyarakat. Keempat, kegiatan gotong royong pembersihan lingkungan memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menjaga tradisi lokal dalam menjaga kebersihan bersama. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, rasa memiliki terhadap lingkungan semakin kuat.

Meskipun cakupannya sederhana, program ini menysasar isu yang sangat penting: keberlanjutan lingkungan. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa program penghijauan, bank sampah, dan pengendalian debu tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Perusahaan dapat memperkuat program ini dengan kolaborasi bersama dinas lingkungan hidup dan kelompok masyarakat, sehingga tercipta model pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Program lingkungan PT X telah mendorong keterlibatan masyarakat, namun partisipasi masih bersifat operasional, bukan pada pengambilan keputusan dan pengelolaan berbasis komunitas. Kelembagaan lingkungan lokal belum cukup kuat untuk memastikan keberlanjutan program tanpa intervensi perusahaan. Dalam konteks pertambangan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar pelaksana teknis kegiatan perusahaan.

7. Bidang Pembentukan Kelembagaan Komunitas Masyarakat

Bidang ini diarahkan untuk memperkuat organisasi masyarakat agar lebih berdaya dalam menunjang pelaksanaan PPM. Dengan alokasi Rp100 juta, perusahaan menjalankan sejumlah program strategis. Pertama, bantuan sarana prasarana kewirausahaan untuk Karang Taruna dan Pramuka. Dukungan ini penting karena kedua organisasi tersebut menjadi wadah generasi muda dalam berkreasi, berwirausaha, dan membangun kepemimpinan. Kedua, perusahaan mendukung PPKM dan UMKM melalui bantuan prasarana. Hal ini memperlihatkan bahwa PT. X tidak hanya mendorong individu, tetapi juga komunitas agar mampu bergerak secara kolektif. Ketiga, bantuan sarana Digital Asap untuk pencegahan karhutla dan keterlibatan dalam forum CSR-PKBL Kabupaten Lahat menunjukkan kepedulian perusahaan pada isu lingkungan strategis.

Selain itu, perusahaan juga menyalurkan bantuan untuk kegiatan olahraga, kepemudaan, dan keorganisasian seperti perlengkapan pramuka, turnamen sepakbola, dan dukungan atlet. Dukungan ini memperkuat rasa kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas komunitas lokal. Kekuatan dari bidang ini adalah mampu menciptakan komunitas yang lebih solid dan mandiri. Namun, tantangannya terletak pada kesinambungan organisasi. Banyak organisasi masyarakat lemah dalam hal manajemen, administrasi, dan keberlanjutan kegiatan. Oleh karena itu, selain bantuan prasarana, perlu adanya pendampingan berupa pelatihan manajemen organisasi dan kepemimpinan. Dengan demikian, kelembagaan masyarakat tidak hanya kuat saat mendapat bantuan, tetapi juga berdaya dalam jangka panjang.

Penguatan kelembagaan masyarakat menjadi fondasi penting keberlanjutan PPM, namun masih menghadapi tantangan lemahnya kapasitas manajerial dan kepemimpinan organisasi lokal. Bantuan sarana fisik belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kemampuan perencanaan, administrasi, dan akuntabilitas. Akibatnya, banyak organisasi masih bergantung pada perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga tujuan kemandirian kelembagaan belum sepenuhnya tercapai.

8. Bidang Pemberdayaan Infrastruktur Masyarakat

Bidang infrastruktur merupakan salah satu program PPM dengan porsi anggaran terbesar, yaitu Rp382 juta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan perusahaan dalam menyediakan fasilitas fisik yang menunjang aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan masyarakat. Pertama, pembangunan lapangan olahraga seperti futsal, badminton, dan voli memberikan ruang aktivitas positif bagi pemuda serta memperkuat ikatan sosial masyarakat. Kedua, pembangunan dan renovasi pusat pasar serta rumah penjualan UMKM menjadi langkah penting dalam mendukung perekonomian lokal. Pasar tradisional yang lebih baik akan meningkatkan sirkulasi ekonomi desa dan memperluas akses jual beli produk masyarakat. Ketiga, renovasi infrastruktur sekolah seperti pagar, gedung, dan lapangan upacara meningkatkan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa.

Selain itu, bantuan sarana pondok pesantren dan rumah ibadah memperlihatkan perhatian pada aspek spiritual masyarakat. Pembangunan dan renovasi jalan desa serta kantor desa juga sangat vital karena meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, serta tata kelola pemerintahan lokal. Selanjutnya, pembangunan perpustakaan desa berfungsi mendukung literasi, sementara sumur bor menjadi solusi bagi kebutuhan air bersih, yang merupakan aspek fundamental dalam kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, namun tantangan utama terletak pada pengelolaan dan pemeliharaan pascapembangunan. Tanpa skema pengelolaan berbasis komunitas dan sinergi dengan pemerintah desa, infrastruktur berisiko mengalami penurunan fungsi. Dalam kerangka good mining practices, pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi bagian dari sistem pembangunan desa jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik perusahaan.

Analisis Hasil Kuesioner

Penggalan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada

masyarakat penerima manfaat program PPM PT X yang berdomisili di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari. Kuesioner disusun berdasarkan indikator relevan dengan judul penelitian. Sebanyak 25 responden diminta memberikan penilaian terhadap 20 pernyataan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tata kelola program.

Pengolahan data menggunakan sistem pembobotan skala Likert dengan rentang nilai 1–5, di mana skor 1 menunjukkan *sangat tidak setuju/tidak puas* dan skor 5 menunjukkan *sangat setuju/sangat puas*. Sistem ini dipilih untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai persepsi masyarakat, sekaligus memudahkan analisis perbandingan antara indikator yang dinilai. Dengan pembobotan ini, hasil kuesioner tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat mencerminkan kecenderungan umum sikap masyarakat terhadap pelaksanaan program PPM.

Hasil kuesioner kemudian dikelompokkan berdasarkan desa asal responden untuk melihat variasi persepsi antarwilayah. Data dari Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari dianalisis secara gabungan, dengan memperhatikan distribusi jawaban responden pada tiap pernyataan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kecenderungan dominan, kesenjangan persepsi, serta indikator yang dinilai masih lemah. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan masalah dan tantangan utama dari implementasi PPM PT X yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan program di masa depan.

Tabel 1. Hasil Kuisisioner

No	Pernyataan	Jawaban Responden									
		Desa Prabumenang (orang)					Desa Banjarsari (orang)				
		1 (STS /TP)	2 (TS /TP)	3 (Netral)	4 (S/P)	5 (SS/ SP)	1 (STS /TP)	2 (TS /TP)	3 (Netral)	4 (S/P)	5 (SS /SP)
1	Program PPM dari perusahaan tambang batubara sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.	0	1	7	1	1	0	2	5	6	2
2	Informasi mengenai program PPM mudah diperoleh oleh masyarakat.	0	1	7	2	0	1	1	4	7	2
3	Perusahaan tambang melibatkan masyarakat dalam perencanaan program PPM.	0	0	2	6	2	0	0	7	5	3
4	Program PPM lebih banyak bersifat jangka pendek daripada jangka panjang.	1	4	4	1	0	0	1	6	8	0
5	Pelaksanaan program PPM transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.	0	0	4	5	1	0	0	4	6	5
6	Ada kendala komunikasi antara perusahaan tambang dengan masyarakat terkait program PPM.	1	2	5	2	0	1	2	7	5	0
7	Program PPM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.	0	0	1	9	0	0	0	6	6	3
8	Program PPM mendukung pembangunan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).	0	0	4	5	1	0	0	4	5	6
9	Tantangan utama program PPM adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat.	0	1	6	3	0	0	0	6	7	2
10	Program PPM sering terkendala masalah koordinasi dengan pemerintah daerah.	1	1	5	3	0	2	6	5	2	0
11	Perusahaan tambang menyediakan pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat setelah program berjalan.	1	0	2	6	1	0	0	10	3	2
12	Program PPM memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar tambang.	0	1	4	3	2	2	0	7	2	4
13	Masyarakat merasa puas terhadap hasil program PPM	0	1	6	3	0	0	3	10	2	0

No	Pernyataan	Jawaban Responden									
		Desa Prabumenang (orang)					Desa Banjarsari (orang)				
		1 (STS /TP)	2 (TS /TP)	3 (Netral)	4 (S/P)	5 (SS/ SP)	1 (STS /TP)	2 (TS /TP)	3 (Netral)	4 (S/P)	5 (SS /SP)
14	yang telah dilaksanakan. Terdapat ketidakmerataan masalah manfaat program PPM di kalangan masyarakat.	0	3	5	2	0	1	4	7	3	0
15	Program PPM membantu masyarakat lebih mandiri secara ekonomi.	0	1	4	5	0	0	3	5	7	0
16	Terdapat tantangan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPM.	0	0	4	4	2	0	1	6	7	1
17	Perusahaan tambang memiliki komitmen jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan melalui PPM.	0	0	6	2	2	1	2	7	1	4
18	Masalah utama PPM adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan.	2	0	5	3	0	0	3	6	4	2
19	Program PPM sudah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan).	1	0	5	4	0	0	4	8	3	0
20	Menurut Anda, program PPM perlu ditingkatkan kualitas dan keberlanjutannya di masa depan.	0	0	0	7	3	0	0	4	3	8

Kajian Hasil Kuesioner Program PPM PT. X

Hasil pengumpulan data melalui kuesioner di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari memperlihatkan persepsi masyarakat terhadap implementasi Program PPM yang dijalankan oleh PT. X, secara umum masyarakat menilai program PPM memberikan manfaat nyata, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan.

1. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat

Mayoritas responden menilai bahwa program PPM cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun ada sebagian kecil yang menilai masih kurang tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha menyusun program sesuai konteks lokal, namun perlu memperkuat mekanisme survei kebutuhan masyarakat agar program lebih responsif.

Temuan mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sejalan dengan konsep stakeholder engagement dalam good mining practices, yang menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan berbasis konteks lokal. Namun, masih adanya respon netral dan negatif menunjukkan bahwa proses identifikasi kebutuhan belum sepenuhnya partisipatif. Menurut Riska & Dewi (2025), keterlibatan masyarakat yang bersifat konsultatif saja tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan sosial, karena masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan agar memiliki rasa kepemilikan terhadap program.

2. Transparansi dan Akses Informasi

Sebagian besar responden menilai informasi program cukup mudah diakses, meski ada yang menyebutkan kendala komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Transparansi pelaksanaan program dinilai baik, namun isu koordinasi dengan pemerintah daerah masih dianggap sebagai hambatan dalam implementasi.

Persepsi positif terhadap transparansi menunjukkan adanya upaya akuntabilitas perusahaan, namun kendala komunikasi dan koordinasi mengindikasikan lemahnya tata kelola kolaboratif. Dalam teori CSR berkelanjutan, transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga dengan efektivitas komunikasi dua arah (Kamalirezaei et al., 2020). Tanpa mekanisme komunikasi yang inklusif, transparansi berisiko menjadi formalitas administratif.

3. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program dinilai relatif baik, namun tantangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Hal ini berpotensi membuat program kurang berkelanjutan karena masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki.

Lemahnya partisipasi aktif masyarakat yang teridentifikasi dalam kuesioner mencerminkan tantangan keberlanjutan sosial. Dalam kerangka *good mining practices*, partisipasi bermakna (*meaningful participation*) merupakan prasyarat utama keberhasilan PPM (Jiang et al., 2022). Ketika masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat, program cenderung bergantung pada perusahaan dan sulit berlanjut dalam jangka panjang.

4. Dampak Ekonomi dan Sosial

Responden menilai program PPM berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan mendukung pembangunan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur). Akan tetapi, terdapat catatan tentang ketidakmerataan manfaat serta perlunya pendampingan berkelanjutan agar program pemberdayaan ekonomi dapat lebih efektif.

Kontribusi PPM terhadap peningkatan pendapatan dan fasilitas umum menunjukkan dampak positif, namun ketidakmerataan manfaat menandakan adanya kesenjangan sosial. Menurut Gugule & Mesra (2022), program pemberdayaan yang tidak menjangkau kelompok rentan berisiko memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu, PPM perlu dirancang dengan pendekatan inklusif agar manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara lebih adil.

5. Dimensi Lingkungan

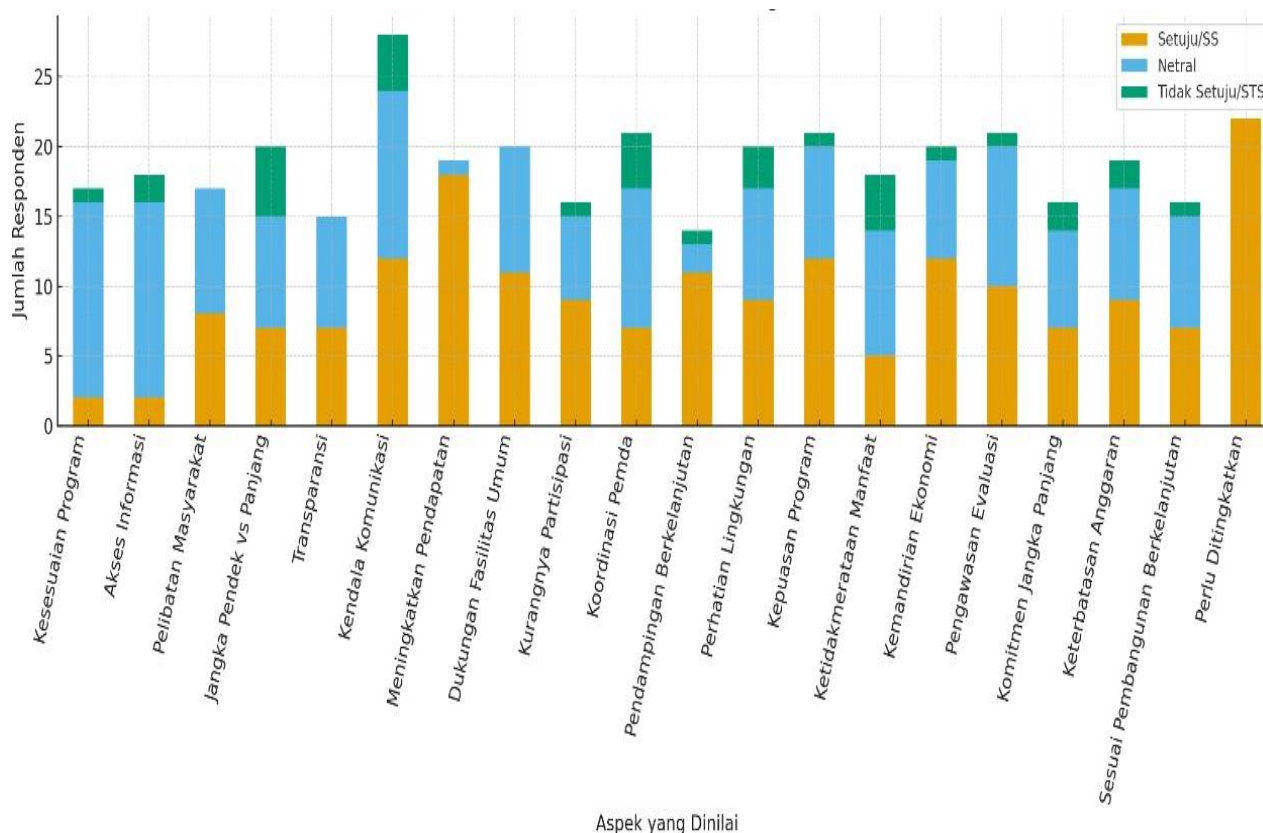
Perhatian terhadap aspek lingkungan dinilai cukup ada, namun belum maksimal. Sebagian masyarakat menganggap program belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal kelestarian lingkungan.

Persepsi masyarakat bahwa perhatian terhadap lingkungan belum optimal menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan implementasi. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, dimensi lingkungan harus terintegrasi dengan dimensi sosial dan ekonomi (Carlini & Grace, 2021). CSR lingkungan yang hanya berfokus pada mitigasi teknis tanpa pemberdayaan masyarakat berpotensi gagal menjaga keberlanjutan ekologi jangka panjang.

6. Komitmen dan Keberlanjutan

Mayoritas responden menilai bahwa perusahaan memiliki komitmen jangka panjang, meski masih ada keraguan terkait keberlanjutan program setelah perusahaan tidak lagi beroperasi. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa program PPM perlu ditingkatkan kualitas dan keberlanjutannya di masa depan.

Penilaian positif terhadap komitmen perusahaan, disertai keraguan atas keberlanjutan pascatambang, menunjukkan tantangan transisi menuju kemandirian masyarakat. Menurut Gumanti et al. (2016), keberhasilan CSR pertambangan diukur dari kemampuan program bertahan setelah perusahaan mengurangi aktivitasnya. Oleh karena itu, PPM PT X perlu diarahkan pada penguatan kapasitas lokal agar keberlanjutan tidak sepenuhnya bergantung pada keberadaan perusahaan.



Aspek yang Dinilai
Gambar 1. Grafik Hasil Rekap Kuesioner Penelitian
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil kuesioner di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum menilai program PPM PT X bermanfaat, terutama dalam peningkatan pendapatan, dukungan fasilitas umum, serta penguatan sosial-budaya. Namun, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan utama, yaitu: 1) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan program, sehingga keberlanjutan masih bergantung pada perusahaan. 2) Keterbatasan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menghambat sinergi antar pihak. 3) Manfaat program belum merata, sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh dampak signifikan. 4) Pendampingan berkelanjutan masih lemah, terutama pada program ekonomi produktif. 5) Aspek lingkungan belum optimal, sehingga keberlanjutan ekologi masih menjadi catatan kritis.

Dengan demikian, meskipun program PPM PT X telah memberikan kontribusi nyata, diperlukan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta model pemberdayaan yang lebih partisipatif dan terukur, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai judul penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kuesioner di Desa Prabumenang dan Desa Banjarsari, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum menilai program PPM PT X bermanfaat, terutama dalam peningkatan pendapatan, dukungan fasilitas umum, serta penguatan sosial-budaya. Namun, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan utama, yaitu: Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan maupun pengelolaan program, sehingga keberlanjutan masih bergantung pada perusahaan, Keterbatasan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah, yang menghambat sinergi antar pihak, Manfaat program belum merata, sehingga ada sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh dampak signifikan, Pendampingan berkelanjutan masih lemah, terutama pada program ekonomi produktif, Aspek lingkungan belum optimal, sehingga keberlanjutan ekologi masih menjadi catatan kritis. Dengan demikian, meskipun

program PPM X telah memberikan kontribusi nyata, diperlukan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta model pemberdayaan yang lebih partisipatif dan terukur, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Disarankan agar pemerintah daerah berperan lebih aktif sebagai koordinator dan fasilitator Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan membentuk forum koordinasi lintas pemangku kepentingan, menyelaraskan program PPM dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKP Desa), serta memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, khususnya pada aspek ekonomi produktif dan lingkungan. Sementara itu, manajemen perusahaan perlu menggeser pendekatan PPM dari berbasis bantuan menuju pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan melalui musyawarah desa, memperkuat pendampingan berkelanjutan pascapelatihan melalui kemitraan dengan dinas teknis, koperasi, dan lembaga pelatihan, serta menyusun roadmap PPM jangka menengah dan panjang yang memuat target, indikator keberhasilan, dan strategi exit program untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu, penguatan aspek lingkungan perlu dilakukan melalui integrasi program PPM dengan pengelolaan lingkungan tambang berbasis komunitas, seperti bank sampah, penghijauan produktif, dan edukasi lingkungan berkelanjutan, sehingga program PPM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mendukung kemandirian masyarakat dan pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah sekitar tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, J. (2020). Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility. *Journal of Cleaner Production*, 242, 118458. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619333281>
- Abu Zayyad, H. M., Obeidat, Z. M., Alshurideh, M. T., Abuhashesh, M., Maqableh, M., & Masa'deh, R. (2021). Corporate social responsibility and patronage intentions: The mediating effect of brand credibility. *Journal of Marketing Communications*, 27(5), 510–533. <https://doi.org/10.1080/13527266.2020.1728565>
- Aljarah, A., Emeagwali, L., Ibrahim, B., & Ababneh, B. (2020). Does corporate social responsibility really increase customer relationship quality? A meta-analytic review. *Social Responsibility Journal*, 16(1), 28–49. <https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2018-0205>
- Anwar, R., & Malik, J. A. (2020). When does corporate social responsibility disclosure affect investment efficiency? A new answer to an old question. *Sage Open*, 10(2), 2158244020931121. <https://doi.org/10.1177/2158244020931121>
- Bansal, M., & Kumar, V. (2021). Forcing responsibility? Examining earnings management induced by mandatory corporate social responsibility: evidence from India. *Review of Accounting and Finance*, 20(2), 194–216. <https://doi.org/10.1108/RAF-06-2020-0151>
- Blanco-Gonzalez, A., Diéz-Martín, F., Cachón-Rodríguez, G., & Prado-Román, C. (2020). Contribution of social responsibility to the work involvement of employees. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 2588–2598. <https://doi.org/10.1002/csr.1978>
- Burkhardt, K., Nguyen, P., & Poincelot, E. (2020). Agents of change: Women in top management and corporate environmental performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1591–1604. <https://doi.org/10.1002/csr.1907>
- Bux, H., Zhang, Z., & Ahmad, N. (2020). Promoting sustainability through corporate social responsibility implementation in the manufacturing industry: An empirical analysis of barriers using the ISM-MICMAC approach. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1729–1748. <https://doi.org/10.1002/csr.1920>
- Carlini, J., & Grace, D. (2021). The corporate social responsibility (CSR) internal branding model: Aligning employees' CSR awareness, knowledge, and experience to deliver positive employee performance outcomes. *Journal of Marketing Management*, 37(7–8), 732–760.

- <https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1860113>
- Drempetic, S., Klein, C., & Zwergel, B. (2020). The influence of firm size on the ESG score: Corporate sustainability ratings under review. *Journal of Business Ethics*, 333–360. <https://www.jstor.org/stable/45386660>
- Fusheini, K., & Salia, H. (2021). The contribution of corporate social responsibility (CSR) initiatives to student enrollment and performance in Ghana. *International Journal of Educational Management*, 35(3), 606–620. <https://doi.org/10.1108/IJEM-07-2020-0348>
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Peran program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) dalam inovasi tanaman coklat pada kelompok tani di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(4), 816–822. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/viewFile/4139/3075>
- Gumanti, S., Juniah, R., & Taqwa, R. (2016). Kajian Implementasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan. *Jurnal Empirika*, 1(2), 111–126. <https://doi.org/10.47753/je.v1i2.18>
- Hasan, I., Singh, S., & Kashiramka, S. (2022). Does corporate social responsibility disclosure impact firm performance? An industry-wise analysis of Indian firms. *Environment, Development and Sustainability*, 24(8), 10141–10181. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-021-01859-2>
- Hassan, L. S., Saleh, N. M., & Ibrahim, I. (2020). Board diversity, company's financial performance and corporate social responsibility information disclosure in Malaysia. *International Business Education Journal*, 13(1), 23–49. <https://scholar.archive.org/work/yxk4fawyfjhtzf22dew6yizmqq/access/wayback/https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/IBEJ/article/download/3153/2313>
- Hemerijck, A. (2020). Social investment as a policy paradigm. In *The Future of the Social Investment State* (pp. 10–27). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429454752-2/social-investment-policy-paradigm-anton-hemerijck>
- Huynh, Q. L. (2020). A triple of corporate governance, social responsibility and earnings management. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(3), 29–40. https://oak.go.kr/central/journalist/journaldetail.do?article_seq=23385
- Ji, H., & Miao, Z. (2020). Corporate social responsibility and collaborative innovation: The role of government support. *Journal of Cleaner Production*, 260, 121028. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620310751>
- Jiang, W., Zhang, C., & Si, C. (2022). The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance. *Technological Forecasting and Social Change*, 179, 121646. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162522001780>
- Juniah, R., & Sastradinata, M. (2017). Study benefit value of utilization water resources for energy and sustainable environment. *AIP Conference Proceedings*, 1903(1), 40020. <https://doi.org/10.1063/1.4940020/856716>
- Kamalirezaei, H., Anvary Rostamy, A. A., Saeedi, A., & Khodaei Valeh Zaghard, M. (2020). Corporate social responsibility and bankruptcy probability: Exploring the role of market competition, intellectual capital, and equity cost. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 31(1), 53–63. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcaf.22417>
- Khuong, M. N., Truong An, N. K., & Thanh Hang, T. T. (2021). Stakeholders and Corporate Social Responsibility (CSR) programme as key sustainable development strategies to promote corporate reputation—evidence from vietnam. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1917333. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1917333>
- Li, C., & Wang, X. (2022). Local peer effects of corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 73, 102187. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911992200030X>
- Menassa, E., & Dagher, N. (2020). Determinants of corporate social responsibility disclosures of



- UAE national banks: a multi-perspective approach. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 631–654. <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2017-0191>
- Nguyen, N. G., & Nguyen, N. T. (2023). Determinants of Voluntary International Financial Reporting Standards Application: Review from Theory to Empirical Research. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(11), 485. <https://doi.org/10.3390/jrfm16110485>
- Riska, R., & Dewi, H. (2025). Kolaborasi antara Lurah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Kelurahan untuk Pembangunan Berkelanjutan. *BESTARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 44–50. <https://ejournal.almusthofa.org/index.php/bestari/article/view/31>
- Sadiq, M., Nonthapot, S., Mohamad, S., Chee Keong, O., Ehsanullah, S., & Iqbal, N. (2022). Does green finance matter for sustainable entrepreneurship and environmental corporate social responsibility during COVID-19? *China Finance Review International*, 12(2), 317–333. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/cfri-02-2021-0038/full/html>
- Sarhan, A. A., & Al-Najjar, B. (2023). The influence of corporate governance and shareholding structure on corporate social responsibility: The key role of executive compensation. *International Journal of Finance & Economics*, 28(4), 4532–4556. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2663>
- Susilo, A., Juniah, R., & Taqwa, R. (2022). PERFORMANCE ANALYSIS OF CSR IMPLEMENTATION OF PT. GOLDEN GREAT BORNEO YEAR 2021 IN LAHAT DISTRICT. *Journal Research of Social Science, Economics & Management*, 1(12). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v1i12.225>
- Umar, U. H. (2022). Relationship between board independence and CSR spending of Islamic banks in Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 201–218. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1451>
- Velte, P. (2020). Do CEO incentives and characteristics influence corporate social responsibility (CSR) and vice versa? A literature review. *Social Responsibility Journal*, 16(8), 1293–1323. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SRJ-04-2019-0145/full/html>
- Zamir, F., & Saeed, A. (2020). Location matters: Impact of geographical proximity to financial centers on corporate social responsibility (CSR) disclosure in emerging economies. *Asia Pacific Journal of Management*, 37(1), 263–295. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10490-018-9619-3>
- Zheng, H., Jiang, S., & Wu, Q. (2022). Factors influencing COVID-19 vaccination intention: The roles of vaccine knowledge, vaccine risk perception, and doctor-patient communication. *Patient Education and Counseling*, 105(2), 277–283. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.09.023>